

Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sd Negeri Sukacai, Kabupaten Serang

Hary Setiawan¹

Samsul Ode²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

harysetiawan.cskur@gmail.com

odesamsul@yahoo.com

Abstrack

Program Indonesia Pintar is a national program that aims to remove impediments for school by helping poor students to gain access to a decent education services, preventing dropout, encourage poor students to go back to school, help students to fulfill the needs in learning activities, the purpose of this research is to determine how the implementation of Program Indonesia Pintar at SD Negeri Sukacai 3 Sub-district Baros, Serang Regency running. Formulation of the problem of the research is to find out the implementation of the Program Indonesia Pintar at SDN Sukacai 3 and whether the implementation has been right on target or not. This research used descriptive qualitative research method. The informants of this research consisted of technical implementation unit of education agency (UPTD) of Sub-district Baros, principal of SDN Sukacai 3, staff of SDN Sukacai 3, parents of students and officers of BRI Unit Baros. Researcher used purposive technic for choosing the informants.

The result of the research shows that the implementation of Program Indonesia Pintar at SDN Sukacai 3 already well underway, viewed from various aspects such as communication, resources, disposition and the bureaucratic structure. Distribution of the grant-in-aid of Program Indonesia Pintar at SD Negeri Sukacai 3 is already on target where the information has reached the recipient policies, which are the parents of students.

Keyword: *implementation, Program Indonesia Pintar, poor students.*

Abstrak

Program Indonesia Pintar adalah program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Program Indonesia Pintar yang dilakukan di SD Negeri Sukacai 3 Baros Kecamatan Baros. Masalah yang ingin yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 Kecamatan Baros Kabupaten Serang, dan ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan dari penelitian ini terdiri dari UPTD Pendidikan Kecamatan Baros, Kepala SDN Sukacai 3, staff SDN Sukacai 3, wali murid SDN Sukacai 3 serta Kepala BRI Unit Baros. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik purposif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Sukacai 3 sudah berjalan dengan baik dilihat dari berbagai aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasinya. Penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 sudah tepat sasaran, dimana informasi sudah sampai pada penerima kebijakan yaitu wali murid.

Kata Kunci: implementasi, program indonesia pintar, siswa miskin

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek penting dalam proses pembangunan nasional dan regional. Pembangunan bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada pada suatu wilayah atau daerah. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan meningkatkan daya saing dalam memasuki dunia kerja. Dengan pendidikan pula, memudahkan pemerintah dalam mentransfer tujuan pembangunan kepada masyarakat karena tingkat pemahaman masyarakat akan lebih baik kalau pendidikan juga lebih baik. Upaya melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan yang terarah dan tepat sasaran telah ditentukan visi pendidikan nasional yaitu "terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, betaqwa, berakhlak mulia,

cinta tanah air berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin".

Pendidikan sebagai usaha sadar yang selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Secara umum, pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.

Meskipun kemampuan membaca dan menulis masyarakat sudah cukup tinggi (90,25%), namun rata-rata lama sekolah penduduk 10 tahun keatas hanya 5,75 tahun dengan kata lain rata-rata masih berpendidikan / tamat sekolah dasar. Hingga kini kualitas Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang dinilai belum memenuhi standar komprehensif satuan pendidikan. Banyak komponen pendidikan yang berjalan tidak sesuai standar pada prinsipnya standar satuan pendidikan tersebut meliputi sarana prasaran yang baik, kualitas guru pengajar dan sistem pembelajaran. Jumlah siswa/siswi di sejumlah sekolah saat ini seolah tidak sebanding dengan kondisi sekolah dan guru pengajar. Akibatnya, tidak semua siswa/siswi *tercover* dengan baik.

Partisipasi sekolah anak di Serang dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD/Sederajat, SMP/Sederajat maupun SMA/Sederajat. Angka ini menunjukkan partisipasi anak pada usia sekolah yang bersekolah, baik pada usia SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) maupun SMA (16-18 tahun). Angka ini juga menunjukkan berapa besar keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan program pendidikan yang ada. Secara umum APM Kabupaten Serang pada tahun 2013/2014 untuk anak usia SD sebesar 95,66 persen. Ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak anak usia SD yaitu 7 sampai 12 tahun hanya 95 persen yang bersekolah. Sisanya sebesar 5 persen dari anak usia SD tersebut tidak bersekolah baik yang putus sekolah maupun yang belum pernah sekolah. Berikut adalah tabel data angka partisipasi sekolah di Kabupaten Serang:

Tabel 1.1
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Serang 2013/2014

No	Penduduk Usia 7-12 Thn	Siswa Usia 7-12 Tahun	Jumlah	APK (%)	APM (%)
		SD			
1.	170.562	154.436	163.155	109,17	95,66

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016

(data diolah)

Secara umum penduduk laki-laki di Kecamatan Baros cenderung memiliki partisipasi akademis lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Pada tahun akademis 2013/2014 jumlah penduduk laki-laki pada umumnya lebih banyak dari pada perempuan untuk tiap jenjang pendidikan. Pada usia 5-7 tahun, persentase Angka Partisipasi Sekolah di Kecamatan Baros penduduk laki-laki 52,02% penduduk perempuan 47,98%. Untuk tingkat SD atau usia 7-12 tahun, laki-laki 52,12% perempuan 47,88%. Pada jenjang SMP, usia 13-15 tahun laki-laki 52,20% perempuan 47,80%. Usia 16-18 tahun atau jenjang SMA, laki-laki 55,73% perempuan 44,27%. Sedangkan untuk jenjang D1/D2/D3/S1 usia 19-24 tahun, laki-laki 54,43% perempuan 45,57%. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berupa tenaga pendidik dan sarana fisik sangatlah penting. Di Kecamatan Baros, jumlah gedung sekolah pada tahun 2010 mencapai 35 Sekolah (Tingkat SD, SMP, dan SMA), yang terdiri dari 25 buah gedung sekolah SD, 6 buah gedung sekolah SMP, 5 buah gedung sekolah SMA/SMK. Berikut ini adalah tabel mengenai jumlah sekolah, jumlah guru serta jumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Baros.

Tabel 1.2
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar di Kecamatan Baros
Tahun 2015

No	Desa/ Kelurahan	Sekolah		Guru		Murid	
		Negeri	Swasta	L	P	L	P
1.	Sukacai	2	-	7	10	257	232
2.	Sukamenak	1	1	5	13	263	251
3.	Tejamari	2	-	8	10	303	291
4.	Panyirapan	2	-	6	11	251	249
5.	Tamansari	1	-	6	2	144	136
6.	Sindangmandi	2	-	8	11	227	196
7.	Curug Agung	1	-	4	5	171	135
8.	Sukamanah	2	-	4	16	271	135
9.	Padasuka	1	-	3	5	113	94
10.	Sinarmukti	1	-	2	5	127	109
11.	Sidamukti	2	-	3	16	323	322
12.	Baros	4	-	9	37	663	547
13.	Cisalam	2	-	8	8	216	173
14.	Sukaindah	1	-	3	8	180	193
Jumlah		24	1	76	157	3509	3171

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Baros.2016 (data diolah)

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya. Program Bantuan Siswa Miskin adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan

siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah. Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.

Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi dengan besaran sebagai berikut:

1. BSM SD & MI sebesar Rp 225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun.
2. BSM SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per tahun
3. BSM SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester atau Rp 1.000.000 per tahun.

Penerima dana BSM yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah siswa miskin dan rentan pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta yang telah memenuhi kriteria sesuai pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penerima dana Beasiswa Bakat dan Prestasi

adalah siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik/non-akademik pada SD, SMP, SMA atau SMK yang telah memenuhi kriteria sesuai pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program Indonesia Pintar diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Pada Periode Agustus 2015 penyaluran PIP diprioritaskan untuk :

1. Siswa Miskin Usulan Sekolah

Mengacu pada rencana diatas maka untuk PIP periode April – Juni (tahap 1) dan periode Juli 2015 (tahap 2) sudah mulai disalurkan, dan saat ini mulai memasuki persiapan penyaluran untuk periode Juli - Agustus 2015 (tahap 3) maka telah dibuka pengajuan lewat FUS (format Usulan Sekolah) untuk siswa yang tidak memiliki kartu KPS/KKS. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk mendorong sekolah dan memastikan bahwa setiap sekolah di wilayahnya untuk segera mengisi dan memutakhirkan data Dapodikmen, utamanya pengisian no KPS/KKS bagi siswa yang memiliki KPS/KKS. Selanjutnya memastikan data telah masuk ke Manajemen Dapodikmen dengan alamat laman [:http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id](http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id)
2. Kepala Sekolah untuk mengontrol dan memastikan bahwa data pada Aplikasi Dapodikmen di sekolahnya telah diisi dengan lengkap dan valid, utamanya data orang tua siswa dan pengisian no KPS/KKS bagi siswa yang memiliki KPS/KKS sebagai dasar penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2015. Serta memastikan operator sekolah telah melakukan proses Verval PIP dan proses pengajuan FUS (Format Usulan Sekolah).

Berikut adalah daftar penerima bantuan Program Indonesia Pintar di kecamatan Baros:

Tabel 1.3
Daftar Sekolah Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Di
Kecamatan Baros

NO	NAMA SEKOLAH	NSPN
1.	SD Negeri Baros 1	20605515
2.	SD Negeri Baros 2	20605523
3.	SD Negeri Baros 3	20605524
4.	SD Negeri Cisalam	20606095
5.	SD Negeri Daragem	20606099
6.	SD Negeri Kali Buntu	20605825
7.	SD Negeri Padasuka	20605041
8.	SD Negeri Pagedongan	20605033
9.	SD Negeri Panyirapan	20604985
10.	SD Negeri Parung Sentul	20604980
11.	SD Negeri Pasir	20604722
12.	SD Negeri Rampones	20604712
13.	SD Negeri Sengir	20604819
14.	SD Negeri Sidamukti 1	20604785
15.	SD Negeri Sidamukti 2	20604786
16.	SD Negeri Sindangmandi	20604774
17.	SD Negeri Sukacai 1	20605275
18.	SD Negeri Sukacai 2	20605287
19.	SD Negeri Sukacai 3	20605388
20.	SD Negeri Sumurpeuteuy	20605312
21.	SD Negeri Tamansari	20605319
22.	SD Negeri Tejamari 1	20605238
23.	SD Negeri Tejamari 2	20605239
24.	SD Negeri Warung	20605396
25.	SD Terpadu Bani Nur	20605560

Sumber: Arsip UPTD Pendidikan Kecamatan Baros. 2016

Identifikasi masalah yang ditemui dalam observasi awal penelitian ini yaitu masalah pengajuan berkas administrasi penerima bantuan belum berjalan dengan baik, salah satunya persyaratan pengumpulan data siswa peserta PIP di SD Negeri Sukacai . selain itu Kurangnya koordinasi antara

pihak orangtua murid dan pihak sekolah yang menyebabkan terjadinya masalah pencairan dana PIP di SD Negeri Sukacai 3 dan Ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Indonesia Pintar yang dilakukan di SD Negeri Sukacai 3 Baros Kecamatan Baros.

B. LANDASAN TEORI

David Easton dalam Pandji Santosa (2008:27) mendefinisikan kebijakan publik, yaitu pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Definisi Easton ini mengisyaratkan sifat otoritatif dalam proses alokasi, akan tetapi didalam kenyataannya, hanya pemerintah yang dapat bertindak secara otoritatif kepada seluruh masyarakat; apapun yang dipilih pemerintah, baik bertindak maupun tidak bertindak terungkap dalam alokasi ini. Thomas R. Dye yang dikutip oleh Riant Nugroho (2012:120) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil beda. Anderson dalam Budi Winarno (2012:21) mendefinisikan kebijakan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalansedangkan William N. Dunn dalam Pasolong (2010:39), berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain.

Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Berdasarkan macam definisi tentang kebijakan yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam penelitian ini adalah sekumpulan keputusan, tindakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam pendekatan yang diteoremdakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi

1) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena

jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber Daya

1) Staff

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka ketkuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan

diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan kelompoknya.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus di lakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

1) Pengangkatan Birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

2) Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksasna kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

1) *Standard Operating Procedures*

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

2) *Fragmentasi*

Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang terkait dalam fokus utama penelitian ini yaitu, Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Kecamatan Baros, pihak SDN Sukacai 3, wali murid serta lembaga penyalur. Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan metode triangulasi data. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis teknik data model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Waktu penelitian berlangsung sejak bulan februari hingga bulan november tahun 2016. Lokasi penelitian berada di SDN Sukacai 3 Kabupaten Serang.

D. HASIL PENELITIAN

Pembahasan hasil penelitian menggunakan model implementasi Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi.

1. Komunikasi

Terdapat 3 (tiga) indikator yang untuk mengukur aspek komunikasi dalam penelitian ini yaitu :

a. Transmisi

Sosialisasi Program Indonesia Pintar di tingkat kecamatan dilakukan dengan mengadakan rapat yang dilakukan oleh UPTD Pendidikan terhadap para kepala sekolah yang ada di kecamatan Baros. Segala sesuatu yang ingin diinformasikan disampaikan pada saat rapat tersebut, sebagai agen pelaksana terdepan yang membantu peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Serang, UPTD Pendidikan Kecamatan Baros adalah pihak yang sangat diharapkan memegang peran penting dalam menginformasikan secara langsung kepada sekolah-sekolah dan juga masyarakat luas mengenai Program Indonesia Pintar. Pengakuan Bapak Ahyani,S.E sebagai Operator UPTD Pendidikan Kecamatan Baros bahwa pernah dilakukan pertemuan untuk membahas PIP dengan kepala sekolah di wilayah Kecamatan Baros. bukan hanya rapat atau pertemuan yang diadakan oleh UPTD terhadap para kepala sekolah di wilayah kecamatan Baros, tetapi juga diedarkannya surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang mengenai penginformasian PIP oleh kalangan camat di Baros, hal ini dilakukan agar informasi dapat secara efektif tersebar kemasyarakat luas. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator transmisi pada implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar pada SD Negeri Sukacai 3 berjalan baik, karena informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan UPTD sudah tepat sasaran. Indikasi dari hal tersebut adalah kepala sekolah dan masyarakat Kecamatan Baros sudah mengetahui tentang kebijakan PIP.

b. Kejelasan

Berdasarkan data mengenai hasil indikator kejelasan komunikasi, terdapat dua metode sosialisasi yang dilakukan yaitu secara langsung dan tidak langsung yaitu melalui surat edaran yang yang diberikan Dinas Pendidikan. Dapat dilihat bahwa kejelasan implementasi kebijakan PIP sudah baik, hal ini karena para penerima kebijakan sudah mengetahui adanya PIP ini. Hal tersebut terjadi karena implementor sudah melakukan sosialisasi dalam bentuk rapat/pertemuan. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar dengan melaksanakan sosialisasi atau pelatihan yang diberikan langsung terhadap target atau objek sasaran agar dengan adanya pemberitahuan secara langsung oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Baros, pihak sekolah dapat secara langsung bertanya tentang apa yang masih belum mereka pahami tentang PIP. Sosialisasi untuk orangtua siswa mengenai kebijakan PIP ini belum maksimal, walaupun rata-rata dari mereka sudah mengetahui informasi tentang PIP ini, dikarenakan waktu sosialisasi yang tidak terlalu lama dan hanya berupa himbauan saja, orangtua murid biasanya menanyakan hal mengenai PIP ke pihak sekolah untuk mencari kejelasan informasi. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator kejelasan pada implementasi kebijakan PIP di SD Sukacai 3 belum berjalan maksimal, hal ini terlihat dari adanya segelintir orangtua murid yang masih belum paham, menanyakan bagaimana mekanisme pendaftaran PIP.

c. Konsistensi

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu langkah yang dipilih pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembangunan pendidikan selama ini. Konsistensi dalam implementasi kebijakan PIP di SD Negeri Sukacai 3 Kecamatan Baros sudah berjalan berdasarkan petunjuk yang diberikan baik dari Dinas maupun Juknis yang diberikan oleh pemerintah pusat. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang tertuang dalam peraturan dan petunjuk teknis mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus. Namun dibutuhkan kesabaran dan konsistensi lebih dalam

penerapannya agar hasilnya. Berdasarkan data terkait konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan PIP, peneliti mengamati dapat dikatakan sudah baik karena perintah yang diberikan sudah konsisten dan tidak berubah-ubah. Hal ini sesuai dengan ungkapan George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang efektif, maka perintah-perintah harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

2. Sumber Daya

Pada aspek sumber daya peneliti menjabarkan kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat dalam aspek sumber daya. Dua indikator tersebut antara lain :

a) Staff

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Staff yang dimaksud dalam pelaksanaan PIP adalah para petugas yang melaksanakan mulai dari pendataan siswa, pengumpulan dokumen pendaftaran sampai pada proses pencairan dana bantuan untuk siswa yang mendapatkan, dalam pelaksanaannya, pihak SDN Sukacai 3 tidak ada tim khusus atau resmi yang dibentuk, yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah kepala sekolah dan juga dibantu oleh salah satu staff sekolah, dan sifat dari tugas ini hanyalah tugas tambahan saja. Begitu pun halnya yang

terjadi di UPTD Pendidikan Kecamatan Baros, tidak adanya tim khusus yang menangani PIP, seperti yang diungkapkan oleh informan, Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Baros, beliau yang bertanggung jawab untuk meneruskan informasi yang didapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang kepada seluruh sekolah di kecamatan Baros terkait program ini, lalu pengumpulan data siswa pendaftar PIP, melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diperlukan dan pada akhirnya menyerahkan dokumen-dokumen yang terkumpul dari sekolah-sekolah di kecamatan Baros ke Dinas Pendidikan kabupaten Serang. Hal ini dirasa sudah merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab yang memang harus ditunaikan. Staff dari pihak penyalur yaitu BRI Unit Baros begitupun halnya dengan pihak sekolah dan UPTD, tidak adanya staff yang secara tersendiri menangani terkait pengurusan dan pencairan dana PIP, diungkapkan oleh informan Kepala Unit BRI Baros bahwa *costumer service* yang melakukan pemberkasan serta teller yang melakukan transaksi pencairan dana tersebut, hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dikarenakan tugas dari *costumer service* dan juga *teller* yang mempunyai tugas yang sudah lumayan banyak, ditambah lagi dengan adanya PIP. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya staff yang bertugas harus memiliki kesiapan yang memadai dan mau melaksanakan tugasnya.

b) Informasi

Sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Informasi ini penting untuk diketahui

orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka bersedia melaksanakan dan mematuhi apa yang terjadi dalam tugas dan kewajibannya.

Dalam implementasi Program Indonesia Pintar ini, sumber daya informasi yang didapatkan implementor berasal dari pihak Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan kecamatan Baros yang kemudian diteruskan pada pihak sekolah. Informasi yang diberikan sudah didapatkan dengan baik oleh implementor, keterbukaan akses terhadap informasi yang berkaitan dinilai penting demi terlaksananya kebijakan. bukan hanya implementor kebijakan, tetapi juga informasi yang didapat oleh para sasaran kebijakan sudah baik.

Berdasarkan paparan tersebut peneliti menilai bahwa keberadaan sumber daya informasi yang di berikan sudah jelas, karena, Dinas Pendidikan dan UPTD sudah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan ini. Sedangkan masyarakat yang menjadi sasaran atau penerima kebijakan libatkan juga.

c) Fasilitas

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi Program Indonesia Pintar kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas seperti dana atau anggaran dalam melaksanakan yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa fasilitas dalam proses pelaksanaan Program Indoensia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 kecamatan Baros Kabupaten Serang ini tidak ada fasilitas atau anggaran khusus yang diberikan, karena sudah mencakup kedalam tugas dan fungsi dari pihak sekolah, dan pula tidak memerlukan anggaran yang besar dalam pelaksanaannya jadi penyelenggaraan PIP ini pun menggunakan fasilitas yang ada, seperti komputer ataupun hal yang lainnya yang sudah ada.

Berdasarkan penjelasan di atas pelaksanaan Program Indonesi Pintar dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, karena sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam proses penyelenggaraan PIP masih dapat

terpenuhi. Sehingga hal ini sudah dapat dikatakan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya berupa fasilitas merupakan hal yang penting dalam implementasi.

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu. Mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana kebijakan.

a) Mekanisme Penyaluran Dana

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa mekanisme penyaluran dana program Inonesia Pintar sudah dipahami oleh implementor, dalam hal ini, operasional UPTD Pendidikan kecamatan Baros, Kepala Sekolah SDN Sukacai 3 serta sff yang berutang dalam pelaksanaan. dimulai dari pengentrian data siswa kedalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap, data ini sekaligus menjadi data usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke dinas pendidikan, lalu sekolah mengusulkan siswa hasil seleksi sebagai penerima PIP melalui aplikasi verifikasi Inonesia Pintar yang tersedia di laman Kemendikbud ke dinas pendidikan kabupaten Serang lalu dinas pendidikan Kabupaten Serang meneruskan usulan siswa calon penerima dari sekolah dan disetujui oleh dinas pendidikan sebagai usulan ke direktorat teknis. Calon penerima ditetapkan oleh direktorat teknis dalam bentuk surat keputusan. untuk mekanisme penyalurannya setelah Direktorat Teknis Kemendikbud mengeluarkan daftar nama-nama penerima bantuan, lalu mengirimkan SK ke dinas kabupaten, dari dinas menginstruksikan UPTD untuk memberi daftar penerima bantuan, lalu setelah ada instruksi dari Direktorat Teknis Kemendikbu lembaga penyalur dalam hal ini Bank BRI

memberi informasi kepada pihak sekolah untuk pengambilan dana bantuan. Hal tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran dana sudah dipahami oleh pelaksana kebijakan di SD Negeri Sukacai 3

b) Sikap Pelaksana

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Sukacai 3 cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini selalu siap untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hal di atas, peneliti menyimpulkan jika para implementor bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula apabila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

4. Struktur Birokrasi

Pada interpretasi mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada Implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 Kecamatan Baros Kabupaten Serang, peneliti juga akan menjabarkannya kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat pada faktor struktur birokrasi, pembahasan terkait faktor struktur birokrasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Standard Operating Procedures*

Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila adanya standar operasi prosedur sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 Kecamatan Baros Kabupaten Serang telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja atau Standar Operational Prosedur (SOP).

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 Kecamatan Baros Kabupaten Serang telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan atau petunjuk teknis. hal ini dibuktikan dengan adanya petunjuk teknis Program Indonesia Pintar yang disediakan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dapat di lihat ataupun diunduh secara daring, didalamnya memuat peran fungsi, mekanisme pelaksanaan, persyaratan serta sekilas informasi mengenai Program Indonesia Pintar.

Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi.

Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya pendidikan yang lebih baik di SD Negeri Sukacai 3. Berdasarkan pemaparan informan, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang berupa petunjuk pelaksanaan kebijakan sudah begitu paham dan mengerti standar operasional prosedur (SOP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam kebijakan Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 Kecamatan Baros Kabupaten Serang ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP yang telah memuat tugas dan tanggungjawab dari setiap pelaksana kebijakan.

2) Fragmentasi

Berdasarkan hasil penelitian pada subpoint hasil penelitian, dapat diamati bahwa terkait fragmentasi dalam implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Sukacai 3 telah berjalan baik. Pada pelaksanaannya, peneliti mengamati berjalannya implementasi kebijakan ini telah terjalin koordinasi antar pelaksana yaitu melalui kerjasama antara UPTD Pendidikan Kecamatan Baros, pihak SDN Sukacai 3, dan BRI Unit Baros sebagai lembaga penyalur. Melalui kerjasama atau koordinasi yang baik dalam pelaksanaan masing-masing tugas, UPTD Pendidikan Kecamatan Baros sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Maka fragmentasi yang terjadi sesuai dengan ungkapan George C. Edward III yang mengatakan bahwa fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kepada unit-unit organisasi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Sukacai 3 telah sesuai dalam peran dan tugas. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan.

E. KESIMPULAN

Proses implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 sudah berjalan dengan baik, komunikasi antar implementor sudah berjalan sesuai dengan harapan, sumberdaya yang mendukung terlaksananya kebijakan sudah tersedia dan memahami tatacara pelaksanaan kebijakan, kecenderungan atau sikap dari para implementor yaitu SD Negeri Sukacai 3, UPTD Pendidikan serta lembaga penyalur BRI Unit Baros mendukung program ini, ketersediaan prosedur pelaksanaan kebijakan dan juga tugas dan tanggung jawab yang sudah jelas. keterbatasan sumber daya manusia di BRI Unit Baros membuat teknis penyaluran dana menjadi lebih lama.

Penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 sudah tepat sasaran, dimana informasi sudah sampai pada penerima kebijakan yaitu wali murid, murid-murid yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar atau pun kartu yang lainnya yang diberikan oleh pemerintah seperti KPS, KKH sudah mendaftarkan diri ke sekolah. Pihak SD Negeri Sukacai 3 mempunyai disposisi yang baik dan juga kuat dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Sukacai 3.

Agar implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 tetap berjalan dengan baik hendaknya pihak sekolah terus mejalin komunikasi dengan baik kepada UPTD Pendidikan dan juga BRI Unit Baros, dan juga dengan wali murid supaya kerjasama bisa terjalin lebih erat. Demi berlangsungnya implementasi kebijakan yang lebih baik, hendaknya SD Negeri Sukacai 3 memberikan informasi terkait PIP kepada staff yang lainnya supaya mereke juga mengetahui hal tersebut dan juga sosialisasi dilakukan bukan hanya pada orang tua murid yang mendapatkan bantuan saja, tetapi juga harusnya kepada seluruh wali murid yang ada, supaya informasi menjadi jelas dan tidak simpang siur dan menimbulkan kesalahpahaman.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried, 2013. *Teori Dan Konsep Administrasi: Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Rajawali press.
- Dewi, Irra Chrisyanti, 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka.
- Fuad, M., dkk, 2006. *Pengantar Bisnis. Edisi Cetakan Kelima*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handoko, T. Hani, 2012. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2007. *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Bumi aksara.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analys*. Yogyakarta: Gava Media.
- Manullang, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mudhyahardjo, Redja, 2008. *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Dasarnya Dan Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant, 2012. *Public Policy*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta
- Rahmat, Kriyantono, 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikas*, Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group
- Rosady, Ruslan, 2010. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santosa, Pandji, 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama.

Subarsono, AG, 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah :

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1.

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 4 ayat 2.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar.

Sumber Lain :

Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (Pip) Tahun 2015. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2011-2015

Safkaur, Terianus L. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik : Review Teori. Jurnal Ilmu Sosial* [Daring], Volume 12, No.1 [1]. Papua: Universitas Cendrawasih. Tersedia: <http://ejurnal-fisipuncen.org/index.php/jis/article/viewFile/24/>. [11 Juni 2016].